ANALISA YURIDIS PENGGELAPAN DANA PADA BANK PERMATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NO. 568/PID.B/2021/PN.KDI)

Zaki Ismu Prasetya¹, Waluyo²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: waluyoawal7@gmail.com

Abstract

The Abdi Rahman case is a clear example of the problem of embezzlement of funds that often occurs in Indonesia. Abdi Rahman, an employee of PT. Permata Finance Indonesia, was proven to have embezzled company funds amounting to Rp. 61,599,000,-. Abdi Rahman's actions violated Article 374 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement in office. This research aims to analyze the case of embezzlement of Abdi Rahman's funds from the perspective of Indonesian criminal law. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach. Research data was obtained from literature studies, court decisions, and relevant laws and regulations. The results of the research show that Abdi Rahman was legally and convincingly proven to have committed the crime of embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code. The judge sentenced Abdi Rahman to 6 (six) months in prison as a form of accountability for his actions. This research also shows that criminal liability in cases of embezzlement of funds is determined by several factors, namely: the fulfillment of the elements of the crime of embezzlement of funds, evidence of the defendant's malicious intent, and the losses incurred.

Keywords: *Embezzlement, Embezzlement in Office, Criminal Liability,*

Abstrak

Kasus Abdi Rahman merupakan contoh nyata dari permasalahan penggelapan dana yang sering terjadi di Indonesia. Abdi Rahman, seorang karyawan PT. Permata Finance Indonesia, terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp. 61.599.000,-. Perbuatan Abdi Rahman melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penggelapan dana Abdi Rahman dari perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari studi literatur, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdi Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Abdi Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan dana ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dana, bukti niat jahat terdakwa, dan kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci : *Penggelapan, Penggelapan Dalam Jabatan, Pertanggungjawaban Pidana,*

PENDAHULUAN

Kejahatan dapat terjadi dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih. Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dari pembagian kejahatan komersial tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya antara bentuk penyimpangan yang satu. dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat. Keberadaan perusahaan sebagai pilar pembangunan, tentu berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam mensukseskan tujuan pendirian perusahaan. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usahausaha lain yang mempuyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal ini memberikan rumusan adanya hubungan sinergi antara perusahaan dan

tenaga kerja. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Rumusan kedua pasal tersebut sangat jelas menyampaikan pesan bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tenaga kerja yang turut sukses menjalankan dan mengembangkan perusahaan tersebut. Hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja menuntut adanya kebutuhan peningkatan finance yang cukup besar, hal ini akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan peluang timbulnya bentuk-bentuk kejahatan di bidang finansial dan administrasi perusahaan yang pada akhirnya akan merugikan pihak-pihak terkait khususnya perusahaan (pengusaha). Kerugian finansial yang terjadi berupa pengusaha atau pemilik perusahaan mengalami kerugian keuangan salah satunya penggelapan uang perusahaan oleh karyawan.

Sedangkan Penggelapan menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai tindak pidana yang dapat di tuntutan di muka pengadilan. Penjelasan Pasal 372 KUHP mengatakan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat, tidak dengan jalan kejahatan Bila dikaitkan dengan pidana sebagai bentuk khusus dari pelaku tindak pidana penggelapan. Sebagaimana Pasal 374 KUHP yang mengatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Penggelapan uang perusahaan dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan kekuasaan jabatan, dimana seseorang yang memegang barang itu berhubungan langsung dengan pekerjaannya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.

Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa perlunya Penulis memilih judul skripsi ini. Dalam skripsi yang dibahas, Penulis mengangkat sebuah judul yaitu : “ **Analisa Yuridis Penggelapan Dana Pada Bank Permata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 568/Pid.B/2021/PN.KDI)**”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Hukum Penggelapan Dana Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia

Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dana dilakukan oleh seseorang dalam jabatannya. Penggelapan dalam Pasal 374 KUHP memiliki unsur yang sama dengan Pasal 372 KUHP, namun terdapat tambahan unsur berupa melakukan perbuatan tersebut dalam jabatannya. Hal ini sebagaimana pendapat Marbun yang menyatakan berkaitan dengan ketentuan penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, selain mengacu kepada Pasal 374 KUHP, juga mengacu kepada Pasal 372 KUHP sebagai bentuk pidana pokok dari tindak pidana penggelapan.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 568/PID.B/2021/PN.KDI, perbuatan Abdi Rahman dalam kasus penggelapan dana milik PT. Permata Finance Indonesia memang berpotensi dikategorikan sebagai penggelapan yang diperberat dalam Pasal 374 KUHP. Dalam uraian diatas, telah dijabarkan mengenai Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang berarti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena jabatannya memiliki kesempatan untuk menguasai barang tersebut. Dalam kasus Abdi Rahman, sebagai karyawan PT. Permata Finance Indonesia, Abdi Rahman memiliki akses dan kewenangan untuk mengelola dana perusahaan.

Perbuatan Abdi Rahman berdasar pada unsur-unsur penggelapan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Memiliki

Perbuatan memiliki termasuk kedalam unsur objektif penggelapan. Dalam kasus Abdi Rahman yang menguasai dana perusahaan seolah-olah dia adalah pemiliknya, lalu menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa

persetujuan dari PT. Permata Finance Indonesia sejalan dengan definisi perbuatan memiliki yang berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Lebih lanjut lagi, Abdi Rahman memiliki kehendak untuk menguasai dana perusahaan secara permanen dan tidak berniat mengembalikan dana tersebut kepada PT. Permara Finance Indonesia. Perbuatan Abdi Rahman dalam menguasai dana perusahaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dalam unsur objektif penggelapan.

2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Dana perusahaan adalah milik PT. Permata Finance Indonesia dan dipercayakan kepada Abdi Rahman untuk penarikannya pada konsumen PT. Permata Finance Indonesia. Abdi Rahman memiliki akses dan kewenangan untuk menguasai dana tersebut secara sah karena jabatannya sebagai karyawan. Dana perusahaan tersebut seharusnya dikuasai oleh Abdi Rahman untuk keperluan perusahaan dengan cara melakukan penyetoran kepada PT. Permata Finance Indonesia, tetapi Abdi Rahman tidak memiliki hak untuk memilikinya. Abdi Rahman menyalahgunakan haknya untuk menguasai dana tersebut dengan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Unsur objektif "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam kasus penggelapan dana oleh Abdi Rahman terpenuhi. Dana perusahaan yang digelapkan oleh Abdi Rahman secara sah milik PT. Permata Finance Indonesia, dan Abdi Rahman hanya memiliki hak untuk menguasai, bukan memilikinya.

3. Dengan sengaja

Abdi Rahman mengetahui bahwa dana perusahaan yang dikuasainya adalah milik PT. Permata Finance Indonesia. Abdi Rahman tidak berniat mengembalikan dana tersebut dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena, Abdi Rahman mengkehendaki untuk menguasai dana perusahaan dan mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian bagi PT. Permata Finance Indonesia. Terdapat kesadaran akan perbuatannya melawan hukum dan melawan kehendak PT. Permata Finance. Selain itu, Abdi Rahman sadar akan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat

disimpulkan bahwa unsur subjektif "dengan sengaja" dalam kasus penggelapan dana oleh Abdi Rahman terpenuhi. Abdi Rahman mengetahui dan menyadari bahwa dia menguasai dana orang lain dalam hal ini PT. Permata Finance Indonesia secara melawan hukum dan untuk kepentingan pribadi.

4. Melawan hukum

Penyalagunaan kepercayaan yang diberikan oleh PT. Permata Finance Indonesia oleh Abdi Rahman dengan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Abdi Rahman tidak memiliki persetujuan dari PT. Permata Finance Indonesia untuk menggunakan dana tersebut. Dana yang ditarik dari konsumen oleh Abdi Rahman lalu tidak melakukan penyetoran kepada PT. Permata Finance Indonesia merupakan tindakan nyata menguasai dana tersebut secara melawan hukum. Bahwa unsur melawan hukum dalam unsur subjektif penggelapan pada kasus penggelapan dana oleh Abdi Rahman telah terpenuhi. Abdi Rahman mengetahui dan menyadari bahwa dia menguasai dana orang lain secara melawan hukum dan tanpa persetujuan pemiliknya.

5. Penggelapan dalam jabatan

Akses dan kewenangan yang dimiliki Abdi Rahman dalam mengelola dana perusahaan dikarenakan terdapat hubungan kerja pribadi dengan PT. Permata Finance Indonesia sebagai karyawan atau karena jabatannya itulah Abdi Rahman memiliki kesempatan untuk melakukan penarikan dana perusahaan pada konsumen. Penyalahgunaan yang dilakukan Abdi Rahman dengan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang berarti tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang karena jabatannya memiliki kesempatan untuk menguasai barang tersebut. Maka unsur khusus penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP terpenuhi dalam kasus Abdi Rahman dikarenakan terdapat hubungan kerja pribadi dengan PT. Permata Finance Indonesia dan melakukan penggelapan dana perusahaan karena jabatannya.

Dalam kasus Abdi Rahman terdapat hubungan antara Abdi Rahman dengan PT. Permata Finance Indonesia. dimana Abdi Rahman dipercaya untuk mengelola dana

perusahaan dengan cara mengambil dari konsumen dan melakukan penyetoran kepada perusahaan. Namun, Abdi Rahman menyalah gunakan hubungan tersebut dengan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan analisis unsur-unsur objektif dan subjektif, serta unsur khusus penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP, dapat disimpulkan bahwa Abdi Rahman terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terpenuhinya unsur objektif terbukti pada perbuatan Abdi Rahman dalam penggelapan dana perusahaan milik PT. Permata Finace Indonesia, dimana akseh dan kewenangan untuk menguasai tersebit karena jabatannya. Pada unsur subjektif, Abdi Rahman mengetahui dan menyadari bahwa dia menguasai dana orang lain secara melawan hukum dan untuk kepentingan pribadi, perbuatan Abdi Rahman menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh PT. Permata Finance Indonesia merupakan bukti niat Abdi Rahman dalam menguasai dana perusahaan. Selanjutnya unsur khusus penggelapan dalam jabatan juga telah terpenuhi berlandaskan hubungan Abdi Rahman dengan PT. Permata Finance Indonesia merupakan hubunga kerja pribadi dan perbuatan penggelapan dana perusahaan oleh Abdi Rahman dilakukan karena jabatannya.

b. PERTANGGUNG JAWABAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI STUDI PUTUSAN NOMOR 568/PID.B/2021/PN.KDI

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana. Konsep ini menjelaskan alasan mengapa seseorang dapat dihukum atas perbuatannya. Huda menjelaskan jika aturan megenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Aturan pertanggungjawaban pidana tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya. Aturan-aturan ini menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum atas perbuatannya.

Pada penggelapan dana, teori ini penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban pidana ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku

Pelaku penggelapan dana dapat dihukum dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus sesuai dengan tingkat kesalahannya dan kerugian yang ditimbulkan.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam beberapa kasus, perusahaan yang mempekerjakan pelaku penggelapan dana juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan terbukti lalai dalam mengawasi dan mengendalikan karyawannya, sehingga memungkinkan terjadinya penggelapan dana.

Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN.Kdi yang mengadili terdakwa Abdi Rahman yang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan sebesar Rp. 61.599.000,-. Terdakwa Abdi Rahman bekerja sebagai surveyor di PT. Permata Finance Indonesia dengan pekerjaan mengambil dana perusahaan pada konsumen sehingga memiliki akses pada dana perusahaan karena Abdi Rahman dengan jabatannya sebagai surveyor bertugas untuk menagih dan uang angsuran konsumen.

Penggelapan dana oleh Abdi Rahman terungkap ketika terdapat konsumen Abdi Rahman yang datang ke kantor PT. Permata Finance Indonesia untuk melakukan pembayaran angsuran, kemudian kasir pada kantor PT. Permata Finance Indonesia melakukan pengecekan pada sistem, dan ternyata konsumen tersebut sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran sehingga saat itu pihak kantor PT. Permata Finance Indonesia langsung melakukan konfirmasi kepada konsumen namun konsumen tersebut menyampaikan kepada kantor PT. Permata Finance Indonesia bahwa konsumen tersebut tidak pernah menunggak dan konsumen tersebut sering melakukan pembayaran langsung kepada Abdi Rahman.

Pengecekan lebih lanjut dilakukan oleh PT. Permata Finance Indonesia dan menemukan ada beberapa konsumen Abdi Rahman yang sudah melakukan pembayaran namun Abdi Rahman tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen kepada kantor PT. Permata Finance Indonesia. Abdi Rahman menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan

perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi PT. Permata Finance Indonesia sebesar Rp. 61.599.000,-.

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum memberikan dakwaan pada terdakwa Abdi rahman dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Dengan pengajuan bukti-bukti berupa bukti tranfer uang dari konsumen kepada Abdi Rahman, catatan keuangan PT. Permata Finance Indonesia yang menunjukkan bahwa Abdi Rahman tidak menyetorkan uang angsuran konsumen, dan keterangan saksi-saksi, termasuk konsumen yang membayar angsuran kepada Abdi Rahman. Ketika persidangan berjalan, terdakwa Abdi Rahman mengakui perbuatannya dan menyesal akan perbuatannya karena telah menggelapkan dana perusahaan.

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Abdi Rahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka Terdakwa Abdi Rahman harus dinyatakan bersalah.
3. Terdakwa telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya.
4. Keadaan memberatkan bagi terdakwa Abdi Rahman karena telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 61.599.000,- dan telah menikmati hasil perbuatannya.
5. Keadaan meringankan bagi terdakwa Abdi Rahman karena sikap sopan, mengakui perbuatannya dipersidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, dan belum pernah dihukum.

Berdasar atas pertimbangan tersebut, hakim memutus perkara dengan amar putusan :

1. Menyatakan terdakwa Abdi Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan sementara penggelapan dana nasabah PT. Permata Finance Indonesia berjumlah Rp. 61.599.000,-.
 - 1 (satu) lembar kartu piutang atas nama kontrak Slamet dan 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia angsuran 6 (enam) dan 8 (delapan) yang Abdi Rahman serahkan.
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia yang ditandatangani oleh Abdi Rahman.

Dikembalikan kepada kantor PT. Permata Finance Indonesia.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Asmarawati berpendapat, hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Negara Indonesia. Sebagaimana telah disebut dimuka dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 secara khusus ditegaskan kekuasaan kehakiman Pasal 24 dan Pasal 25. Dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh luar. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Abdi Rahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dengan pertimbangannya merupakan bentuk pentingnya kedudukan dan peranan hakim dalam penegakan hukum karena telah mempertanggungjawabkan semua fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim ditempatkan sebagai terminal terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Para pencari keadilan akan kecewa apabila putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum. Melalui keputusan hakim harus mempertanggungjawabkan kepada semua para pihak yang bersangkutan,

masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu pengetahuan hukum, dan yang paling utama kepada Tuhan yang Maha Esa. Lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Pada lembaga peradilan, terdakwa diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abdi Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan alasan pemberat dan meringankan Abdi Rahman pada persidangan. Mardani menyatakan peraturan tentang pemberatan tidak ada suatu pedoman yang pasti, kadang putusan hakim dalam keadaan-keadaan serupa dirasakan tidak wajar ataupun tidak memuaskan. Hukum tidak dapat disamakan dengan teori-teori ilmu pasti, yang dapat ditetapkan sampai pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak terbatas. Aturan-aturan hukum diadakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan dalam masyarakat, dan penerapannya secara konsekuen mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak wajar.

Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi terdakwa Abdi Rahman lalu menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abdi Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Telah dilakukan pertimbangan atas berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Abdi Rahman tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tujuan pemidanaan. Hal ini karena tidak ada pedoman yang pasti dalam menentukan hukuman pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana asas legalitas dalam hukum pidana. Terdapat teori dalam menelaskan dasar hukum mengapa seseorang dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum. Berdasarkan teori schuld atau teori kesalahan jika merujuk pada kasus Abdi Rahman, hakim telah membuktikan bahwa Abdi Rahman telah melakukan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan. Selain itu, hakim juga telah membuktikan bahwa Abdi rahman memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Abdi Rahman dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Selain meninjau pertanggungjawaban pidana Abdi Rahman menggunakan teori schuld, pertanggungjawaban pidana Abdi Rahman juga dapat ditinjau dari teori kausalitas yang merupakan salah satu teori penting dalam pertanggungjawaban pidana dan bertujuan menilai apakah perbuatan pelaku yang menggelapkan dana menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Merujuk pada kasus Abdi Rahman, hakim telah membuktikan bahwa Abdi Rahman telah melakukan perbuatan penggelapan dana dan membuktikan bahwa perbuatan Abdi Rahman secara langsung menyebabkan kerugian bagi PT. Permata Finance Indonesia sebesar Rp.61.599.000,-. Maka berdasarkan teori kausalitas, Abdi Rahman dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Kerugian PT. Permata Finance Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan Abdi Rahman.

Penerapan tentang penghukum menjadi wewenang hakim yang disertai dasar memiliki perasaan yang peka, karena harus mampu menilai dengan objektif sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05/1973, meminta perhatian hakim agar dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan berat ringannya kejahatan dan jangan sampai penjatuhan hukuman menyinggung perasaan yang ada di dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman merupakan kewenangan hakim yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rasa keadilan masyarakat. Perlu adanya perasaan yang peka dan penilaian yang objektif sebagaimana hakim pemutus perkara mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman bagi Abdi Rahman.

Asmarawati berpendapat, dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan:

- a. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.

- b. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud.
- c. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Pada proses mengadili suatu perkara, hakim telah mengadili sebagaimana dalam pendapat Asmarawati. Hakim pemutus perkara pada langkah pertama melakukan penemuan hukum dengan menemukan hukum yang berlaku untuk kasus Abdi Rahman yaitu Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Langkah selanjutnya, hakim pemutus perkara melakukan penafsiran hukum melalui penafsiran unsur-unsur Pasal 374 KUHP untuk memastikan apakah Abdi Rahman memenuhi semua unsur tersebut. Lalu, langkah terakhir adalah menerapkan hukum yang telah ditafsirkan kepada kasus Abdi Rahman yaitu membuktikan bahwa Abdi Rahman telah memenuhi semua unsur Pasal 374 KUHP dan menjatuhkan hukuman sesuatu dengan hukum tersebut. Berdasarkan ketiga langkah tersebut, hakim pemutus perkara telah menemukan hukum yang berlaku untuk kasus Abdi Rahman, menafsirkan hukum tersebut dengan benar dan membuktikan bahwa Abdi Rahman telah memenuhi semua unsur Pasal 374 KUHP dan menerapkan hukum tersebut dengan tepat dan menjatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan kepada Andi Rahman.

Hakim pemutus perkara dalam kasus penggelapan Abdi Rahman telah menjalankan perannya sebagaimana penegakan hukum. hakim pemutus perkara telah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, menerapkan hukum yang berlaku, dan menjatuhkan hukuman yang adil. Putusan hakim dalam kasus penggelapan Abdi Rahman hanya memutus pertanggungjawaban pidana Abdi Rahman. Hal ini berarti bahwa Abdi Rahman hanya dihukum dengan hukuman penjara sebagaimana amar putusan mengukum Abdi Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN.Kdi hanya memutus pertanggungjawaban pidana Abdi Rahman, tanpa mengatur tentang pertanggungjawaban kerugian yang dialami oleh PT. Permata Finance Indonesia.

Mengenai pertanggungjawaban kerugian yang dialami oleh PT. Permata Finance Indonesia dapat dilakukan melalui gugatan perdata.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN.Kdi, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan dana ditentukan beberapa faktor, yaitu :

1. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dana terpenuhi

Terdakwa Abdi Rahman terbukti memiliki akses dan kewenangan terhadap dana perusahaan, menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan, dan perbuatannya telah merugikan PT. Permata Finance Indonesia.

2. Terdakwa Abdi Rahman memiliki niat jahat

Mempertimbangkan pengakuan terdakwa Abdi Rahman dan tidak adanya alasan yang sah atas perbuatannya sebagai bukti bahwa terdakwa Abdi Rahman memiliki niat jahat untuk menggelapkan dana perusahaan.

3. Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa Abdi Rahman telah merugikan perusahaan sebesar Rp. 61.599.000,-.

Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Abdi Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

KESIMPULAN

Terpenuhinya unsur-unsur objektif, subjektif, dan khusus penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP, dapat disimpulkan bahwa Abdi Rahman terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Unsur objektif penggelapan terdapat pada terbuktinya Abdi Rahman melakukan perbuatan penggelapan dana perusahaan milik PT. Permata Finance Indonesia, unsur subjektif terpenuhi karena Abdi Rahman mengetahui dan menyadari bahwa dia menguasai dana orang lain secara melawan hukum dan untuk kepentingan pribadi, dan untuk unsur khusus penggelapan dalam jabatan dibuktikan dengan hubungan Abdi Rahman dengan PT Permata Finance Indonesia merupakan hubungan kerja pribadi lalu perbuatan penggelapan dana perusahaan oleh Abdi Rahman dilakukan karena jabatannya. Terpenuhinya unsur-

unsur penggelapan dalam jabatan pada Pasal 364 KUHP menunjukkan bahwa Abdi Rahman secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Abdi Rahman ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik (unsur subjektif, unsur objektif, dan unsur khusus), bukti niat jahat Abdi Rahman dengan adanya pengakuan atas perbuatan serta tidak adanya alasan yang sah atas perbuatannya, dan kerugian yang ditimbulkan kepada PT. Permata Finance Indonesia sebesar Rp.61.5999.000. oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Abdi Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alam, Wawan Tunggal. *Hukum Bicara (Kasus-Kasus Hukum Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*. Jakarta: Milenia Populer, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Andi Hamzah, Jur. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Bawengan, Gerson G. *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gunandi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Huda, Chairul. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan."* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Marbun, Rocky. *Kiat jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Mardani. *Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Maskun. *Kejahatan Sibery (Cyber Crime). Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mulyadi, Mahmud. *Feri Antoni Surbakti. Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*. Medan: Softmedia, 2010.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Prodjodijoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Peratran dan Delik-Delik Khusus)*. Bogor: Politeia, 1984.
- Rukmono, Bambang Sugeng. *Kesaksian Pejabat Bank: Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsu Di Bidang Perbankan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.